

**Analisis Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Islam
Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi *Online*
(Studi Putusan Nomor : 642/Pid.B/2015/PN.Dps)**

SKRIPSI



Disusun oleh:

Achmad Elfan

NIM: C73214038

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Progam Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

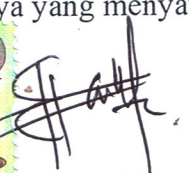
Nama : Achmad Elfan
NIM : C73214038
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara
Pidana Islam Terhadap Pembuktian Tindak Pidana
Prostitusi *Online* (Studi Putusan Nomor:
642/Pid.B/PN.Dps)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Oktober 2018

Saya yang menyatakan,




Achmad Elfan
NIM. C73214038

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Elfan ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 24 Januari 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



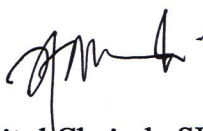
Saoki, SHI., MHI
NIP.197404042007102005

Penguji II,



Drs. H. Jeje Abdul Rojak, M.Ag
NIP.196310151991031003

Penguji III,



Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH., M.Kn
NIP.197903312007102002

Penguji IV,



Siti Tatmainul Qulub, M.SI
NIP.198912292015032007

Surabaya, 31 Januari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Elfan NIM. C73214038 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 25 Oktober 2018

Pembimbing



Saoki, SHL., MHI
NIP.19740402007102005 ,



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ACHMAD ELFAN
NIM : C73214038
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : elfanachmad24@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ACARA PIDANA DAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* (Studi Putusan Nomor : 642/Pid.B/2015/PN.Dps)

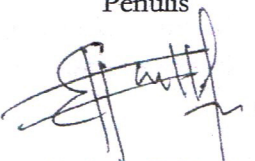
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Februari 2019

Penulis


(Achmad Elfan)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi *Online* (Studi Putusan Nomor 642/Pid.B/2015/PN.Dps)” ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: (1) bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana prostitusi *online* studi putusan nomor 642/Pid.B/2015/PN.Dps?, (2) bagaimana pembuktian terhadap tindak pidana prostitusi *online* dalam hukum acara pidana umum?, (3) bagaimana pembuktin terhadap tindak pidana prostitusi *online* dalam hukum acara pidana Islam?.

Teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan cara studi dokumentasi, yaitu pengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan. Kemudian data dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya dalam hal ini data putusan hakim dengan pola pikir deduktif, yaitu pola pikir yang menerangkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian khusus.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam pembuktian terhadap tindak pidana prostitusi *online* dalam putusan Nomor. 642/Pid.B/2015/PN.Dps adalah dikarenakan salah satu unsur dalam pasal 296 KUHP telah terpenuhi. Unsur tersebut adalah unsur objektif yakni kalimat “menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan”. Hakim berpendapat bahwa, tindakan terdakwa yang memfasilitasi terjadinya prostitusi antara saksi Aplon dan saksi Vita dengan menyuruh kedua saksi untuk bertemu di salah satu Hotel di Denpasar adalah sudah memenuhi unsur objektif dari pasal tersebut. Sehingga hakim memutuskan berdasarkan dakwaan yang diajukan penuntut umum, sedangkan jika hakim teliti dalam melihat fakta-fakta yang dalam persidangan berdasarka keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk, terdakwa telah melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dari analisis penerapan hukum acara pidana, majelis hakim lebih menggunakan teori pembuktin *Negative Wettelijk Stelse* bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidan terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut telah ditentukan oleh undang-undang, dan juga ditentukan adanya keyakinan hakim terhadap alat-alat bukti sehingga keyakinan hakim sangat kuat pengaruhnya terhadap putusan. Dalam hukum acara pidana Islam alat bukti yang diajukan oleh para pihak, yakni pengakuan (*ikrar*), kesaksian (*syahadah*), petunjuk (*qorinah*), dan sumpah (*yamin*).

Sejalan dengan hal tersebut, maka penulis memberikan saran kepada penegak hukum, agar lebih memahami dan mengimplementasikan secara optimal peraturan Perundang-undangan terutama yang mengatur tentang prostitusi khususnya mucikari, karena sering kali para mucikari memanfaatkan perkembangan teknologi dalam menjalankan pekerjaannya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Tujuan Penelitian	15
F. Kegunaan Hasil Penelitian	16
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA DAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM.....	23
A. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia.....	23
1. Pengertian Pembuktian	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis dari ketentuan tersebut menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi negara. Maka dari itu hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu terhadap seluruh elemen masyarakat yang melanggarnya. Hukum yang berlaku di Indonesia harus mampu menampung kepentingan masyarakat dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Salah satunya perkembangan teknologi dan informasi yang tumbuh dengan pesat di Indonesia.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah tatanan kehidupan manusia, seperti cara berinteraksi, gaya hidup maupun pola pikir menuju era modern. Teknologi pada dasarnya diciptakan untuk peningkatan kualitas hidup dan mempermudah aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien.¹ Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang cukup pesat melahirkan internet sebagai fenomena baru dalam masyarakat. Kehadiran internet memudahkan masyarakat untuk

¹ Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Lima, 2013), 1.

Seiring dengan perkembangan dunia maya, berdampak lurus dengan perkembangan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Saat ini, kejahatan tidak hanya terjadi di dunia nyata (*real*), namun juga terjadi di dunia maya (*virtual*) yang bentuknya berbeda dengan kejahatan dunia nyata (*physic*), seperti kejahatan melalui internet.³ Kejahatan dalam internet disebut dengan “*Cybercrime*”. *Cybercrime* diartikan sebagai bentuk penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan informasi melalui komputerisasi dan jaringan internet.

Kejahatan terhadap kesusilaan adalah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan, melanggar kesusilaan ini artinya melakukan perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar kesusilaan itu sifatnya relatif bergantung pada masyarakatnya, tempatnya dan mungkin pula masanya.⁴

Salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang belakangan marak terjadi di Indonesia adalah prostitusi menggunakan media *online*

³ Ibid., 4.

⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), 16.

Prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah sosial yang belum terselesaikan. Prostitusi atau pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran.

Menurut sejarah perkembangannya fenomena prostitusi sudah ada sejak lama di dunia mengikuti perkembangan manusia hingga sekarang. Bentuk pelacuran tertua ditemukan di negara-negara kuno seperti India dan Babilonia kuno.⁷ Praktik prostitusi pada jaman itu berkaitan erat dengan ritual keagamaan dikaitkan dengan konsep kesuburan wanita. Selanjutnya mengalir tanpa jeda hingga muncul prostitusi jalanan atau non keagamaan

⁷ Thanh-Dam Truong, *Seks, Uang Dan Kekuasaan*, (Jakarta: LP3ES, 1992), 20.

Walaupun selalu mendapat cibiran, eksistensi prostitusi tidak lekang oleh waktu. Prostitusi terus bergeliat, beradaptasi menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Prostitusi merupakan masalah yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti mucikari ataupun geromo.

Penutupan lokasi tidak membuat para mucikari atau PSK kehilangan akal. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, beberapa mucikari dan PSK masih beroperasi menjual jasa pelayanan seksual. Teknologi yang dimaksud dalam hal ini adalah telepon seluler dan media sosial. Telepon seluler meningkatkan efisiensi dalam berkomunikasi, sedangkan media sosial membantu orang-orang untuk berkomunikasi dalam jangkauan yang lebih luas.

⁹ Koentjoro, "Melacur sebagai Kewajiban Kerja", *Jurnal Perempuan*, 11, (1999), 54.

Kemudahan yang didapatkan dari sistem prostitusi *online* adalah untuk memperluas mucikari mencari calon pelanggan.¹⁰ Banyak kegiatan-kegiatan praktik prostitusi yang terselubung dan bahkan terlihat dibiarkan oleh pemerintah. Namun dengan melihat dampak dari praktik tersebut, pemerintah juga telah berupaya untuk meminimalisir dari praktik tersebut.

Seperti contoh yang terjadi di Jakarta dua mucikari, Papih H dan Mami M ditangkap karena melakukan prostitusi *online* melalui aplikasi *WeChat*. Kedua pelaku tersebut awalnya mengirimkan pesan berantai untuk menawarkan jasa pijat tradisional melalui aplikasi *WeChat*. Namun, jasa pijat itu hanya kedok kedua pelaku untuk menutupi bisnis haramnya. Pelaku

[illegible]

menyediakan jasa sepuluh pekerja seks komersial, mereka memberikan tarif lima ratus ribu rupiah untuk jasa pijat plus-plus perjamnya.¹¹

Berbicara prostitusi *online* tidak lepas dari pornografi. Pornografi tumbuh pesat terutama setelah dimulainya masa reformasi. Kendati media komunikasi atau pertunjukan yang mengandung muatan materi pornografis telah lama hadir di negara ini, namun tidak pernah dalam skala begitu luas seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini.¹² Masalah pornografi dan pornoaksi semakin memprihatikan dan dampak negatifnya semakin nyata. Diantaranya, sering terjadi perzinahan, pemerkosaan, dan bahkan aborsi maupun pembunuhan.

Pornografi dapat didefinisikan sebagai (gambar, tulisan, lukisan, dan foto) dari aktivitas seksual atau hal yang tidak senonoh, mesum, atau cabul yang dimaksudkan dengan dikomunikasikan kepada publik. Mesum, cabul, atau tidak senonoh dipahami sebagai sesuatu yang melukai dengan sengaja rasa malu atau rasa asusila dengan membangkitkan gairah seksualitas.¹³

Nilai dan sikap masyarakat terhadap pornografi dan pornoaksi sangat beragam. Ada sebagian masyarakat yang sudah tidak asing dan tidak menganggap tabu dan malu lagi bila mereka mendengar, melihat, menyentuh,

¹¹ Ari Sandita Murti, “Kasus Prostitusi Online 2 Mucikari Ditangkap di Apartemen Kalibata”, <http://metro.sindonews.com>, diakses pada “6 Mei 2018”.

¹² Moh. Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung : Citra Bakti, 1994), 1.

¹³ Haryatmoko, *Etika Komunikasi*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), 93.

mempertontonkan, ataupun melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pornografi.¹⁴

Hukum positif Indonesia telah mengatur secara khusus tindak pidana pornografi. Aturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang tindak pidana pornografi, Pasal 4 ayat 2, berbunyi:

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual

Pasal 30, berbunyi:

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ketentuan yang berhubungan dengan masalah prostitusi terdapat dalam pasal 296 dan 506, pasal 296 berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas rupiah”.

Sedangkan pasal 506 berbunyi:

¹⁴ Neng Djubaedah, *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta : kencana, 2009), 2.

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan”.

Selain hukuman materil yang dijelaskan di atas peranan penegak hukum juga sangat berpengaruh terhadap keadilan dimasyarakat. Proses peradilan yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi pedoman bagi majelis hakim dalam menyelesaikan permasalahan di persidangan.

Salah satu yang menjadi bagian dari persidangan adalah pembuktian. Pembuktian merupakan bagian sangat penting yang digunakan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan adanya pembuktian hakim dapat menentukan nasib seorang terdakwa. Apabila kesalahan seorang terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, Maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh majelis hakim. Namun sebaliknya apabila dalam pembuktian terdakwa tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka dapat dibebaskan. Oleh sebab itu, maka hakim harus cermat dan berhati-hati dalam mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai batas minimum kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang tertuang dalam Pasal 182 KUHAP.¹⁵

¹⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Edisi Kedua), (Jakarta;Sinar Grafika, 2009), 273.

media sosial *BBM (Blackberry Messenger)* mengiklankan melalui iklan di sebuah koran. Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang 2008 Pasal 4 ayat 2 seperti yang dijelaskan oleh penulis yang mendasari penulis melakukan penelitian di Pengadilan majelis hakim yang memutuskan terdakwa hakim tidak mempertimbangkan adanya Undang-Undang tersebut yaitu UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pokok hukum tersebut bertentangan dengan adanya Asas tersebut diatur dalam pasal 63 ayat (1) Undang-Undang yang masuk dalam suatu aturan pidana.

media sosial *BBM (Blackberry Messenger)* mengiklankan melalui iklan di sebuah koran. Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang 2008 Pasal 4 ayat 2 seperti yang dijelaskan oleh penulis yang mendasari penulis melakukan penelitian di Pengadilan majelis hakim yang memutuskan terdakwa hakim tidak mempertimbangkan adanya Undang-Undang tersebut yaitu UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pokok hukum tersebut bertentangan dengan adanya Asas tersebut diatur dalam pasal 63 ayat (1) Undang-Undang yang masuk dalam suatu aturan pidana.

media sosial *BBM (Blackberry Messenger)* mengiklankan melalui iklan di sebuah koran. Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang 2008 Pasal 4 ayat 2 seperti yang dijelaskan oleh penulis yang mendasari penulis melakukan penelitian di Pengadilan majelis hakim yang memutuskan terdakwa hakim tidak mempertimbangkan adanya Undang-Undang tersebut yaitu UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pokok hukum tersebut bertentangan dengan adanya Asas tersebut diatur dalam pasal 63 ayat (1) Undang-Undang yang masuk dalam suatu aturan pidana.

media sosial *BBM (Blackberry Messenger)* mengiklankan melalui iklan di sebuah koran. Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang 2008 Pasal 4 ayat 2 seperti yang dijelaskan oleh penulis yang mendasari penulis melakukan penelitian di Pengadilan majelis hakim yang memutuskan terdakwa hakim tidak mempertimbangkan adanya Undang-Undang tersebut yaitu UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pokok hukum tersebut bertentangan dengan adanya Asas tersebut diatur dalam pasal 63 ayat (1) Undang-Undang yang masuk dalam suatu aturan pidana.

3. Bagaimana analisis hukum acara pidana Islam terhadap pembuktian tindak pidana prostitusi *online* (studi putusan nomor: 642/Pid.B/2015/PN.Dps)?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi kajian ringkas tentang penelitian terdahulu yang sudah dilakukan terhadap masalah yang diteliti, untuk mengantisipasi duplikasi dari penelitian yang sudah ada¹⁷. Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa skripsi yang mengangkat tema prostitusi diantaranya:

1. Lail Anugriyani (2017), *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memudahkan Dilakukan Pencabulan* (studi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 138/Pid.sus/2016/PN.Bwi), UIN Sunan Ampel Surabaya, dalam skripsi ini penulis menyatakan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa terlalu ringan karena dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana hanya 4 bulan penjara, sedangkan perbuatan pidana terdakwa melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 2 Ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dimana dalam Undang-Undang

¹⁷ Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: t.p, 2014), 8.

- ¹⁸ Lail Anugriyani, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memudahkan Dilakukan Pencabulan (studi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 138/Pid.sus/2016/PN.Bwi)” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017).

[illegible]

1. Hukum acara pidana adalah suatu peraturan hukum yang berhubungan dengan tindak pidana yang mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya suatu hukum materil.
2. Hukum Acara Pidana Islam adalah hukum hukum yang mengatur cara mengajukan perkara, perselisihan, dan tuntutan, dan cara-cara penuntutan yang ddaapat diterima, dan cara-cara yang dapat melindungi hak-hak seseorang.
3. Pembuktian dilihat dari segi hukum acara pidana adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan.
4. Prostitusi *online* adalah kegiatan seks di luar nikah yang dilakukan pekerja seks komersial yang digunakan sebagai mata pencaharian, dimana dalam menawarkan jasanya melalui media sosial. Dimana dalam prosesnya mucikari akan menawarkan dalam hal ini PSK ke pelanggannya melalui media *online*.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana prostitusi *online* pada putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor. 642/Pid.B/2015/PN.Dps adalah data pertimbangan hakim.

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini membahas tentang kerangka teori yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini adalah membahas teori terkait dengan definisi pembuktian, teori sistem pembuktian, alat bukti baik dari hukum positif maupun hukum Islam.

Bab ketiga, memuat tentang penyajian data dari putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 642/Pid.B/2015/PN.Dps mengenai kronologi, keterangan saksi, bukti, pertimbangan hukum pidana prostitusi *online* dan amar putusan. Bab ini akan memaparkan deskripsi tindak pidana prostitusi *online* dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 642/Pid.B/2015/PN.Dps.

Bab keempat, bab ini merupakan analisis baik dari hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia dan hukum acara pidana Islam terkait isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 642/Pid.B/2015/PN.Dps.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang menjadi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

**TINJAUAN UMUM PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI DALAM HUKUM
ACARA PIDANA DAN ACARA PIDANA ISLAM**

1. Pengertian Pembuktian

a. Menurut Martiman Prodjohamidjojo

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Citra Bakti, 1984), 11.

b. Menurut M. Yahya Harahap

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa.²

c. Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita

Pembuktian adalah bagian dari hukum acara pidana yang dimana di dalamnya mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian syarat-syarat dan bagaimana cara untuk memberikan bukti serta memberikan kewenangan kepada hakim untuk menolak atau menerima suatu pembuktian.³

Dengan adanya pembuktian hakim dapat menentukan nasib terdakwa karena dalam pembuktian terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang di dakwakan oleh penuntut umum. Apabila hasil dari pembuktian dan alat-alat bukti yang telah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan belum cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan, maka terdakwa dapat bebas dari segala

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 273.

³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 10.

1. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgonden*);
2. Alat-alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*);
3. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*);
4. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu terdakwa (*bewijskracht*);
5. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh Undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*) dan;
6. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).

⁴ Bambang Purnomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: Liberti 2004), 39.

seseorang yang sudah dianggap bersalah sebelum adanya pengadilan yang menyatakan orang tersebut bersalah. Asas tidak bersalah pada intinya tidak berorientasi pada hukum, sedangkan asas praduga bersalah bersifat *descriptive vactua* berdasarkan fakta-fakta yang ada selanjutnya akan dianggap bersalah.

3. *Legalitas*

Nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali yang berarti tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelum adanya hukum yang mengatur. Ketentuan ini merupakan aliran klasik dalam hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara.

3. *Legalitas*

3. *Legalitas*

Nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali yang berarti tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelum adanya hukum yang mengatur. Ketentuan ini merupakan aliran klasik dalam hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara.

4. Adversary System

Diartikan sebagai upaya para pihak untuk mengajukan
yang saling berlawanan guna memenangkan putusan
menguntungkan pihaknya. *Adversary System* sangatlah
dengan pembagian beban pembuktian, dalam hal ini b

penuntut umum atau terdakwa dapat saling mengajukan alat bukti dalam rangka meringankan atau memberatkan dakwaan.

5. Beyond a Reasonable Doubt

Beyond a Reasonable Doubt dapat diartikan sebagai sebuah keharusan penuntut umum untuk membuktikan dan tanpa adanya keraguan yang masuk akal kepada hakim mengenai kesalahan terdakwa. Dengan demikian beban pembuktian berada di tangan penuntut umum.⁶

6. *Actori Incumbit Onus Probandi*

Asas *Actori Incumbit Onus Probandi* artinya siapa yang menuntut dialah yang wajib membuktikan. Hukum acara pidana di Indonesia memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum melakukan penuntutan, maka dari itu jaksa penuntut umumlah yang diwajibkan membuktikan kesalahan terdakwa.

7. *Actus Dei Nemini Facit Injuriam*

⁶ Ibid., 38.

8. *Negativa Non Sunt Probanda*

9. *Unus Testis Nullus Testis*

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Asas *Unlawful Legal Evidance* menurut bahasa berarti perolehan bukti yang tidak sah, asas ini sangat berkaitan erat dengan parameter

pembuktian, terutama perihal cara memperoleh serta menyampaikan bukti di depan persidangan.⁷

3. Sistem Pembuktian

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim di dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di pengadilan. Praktik peradilan pidana, dalam perkembangannya ada empat macam teori pembuktian. Masing-masing teori ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan menjadi ciri dari masing-masing teori tersebut. Teori-teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in Time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil

⁷ Ibid., 47.

pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*wettelijke bewijs theorie*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan alasan, *pertama* memang sudah selayaknya harus ada hak hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa menjatuhkan hukuman sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.

pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*wettelijke bewijs theorie*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan alasan, *pertama* memang sudah selayaknya harus ada hak hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa menjatuhkan hukuman sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.

dalam Pasal 183 KUHAP dan dilengkapi dengan Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat-alat bukti yang sah.¹³

pidana yang ia lihat sendiri, dengar, dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu.¹⁵

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan.¹⁶

c. Surat

Surat untuk pembuktian yaitu surat keterangan dari seorang ahli memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi, dibuat atas sumpah jabatan dan dikuatkan dengan sumpah. Contoh: *Visum et Repertum* yaitu suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan barang bukti yang diperiksa serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan. Dalam pasal 183 KUHAP telah dijelaskan secara rinci bentuk-bentuk surat yang dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti, diantaranya:¹⁷

- Menurut pasal 188 KUHP ayat (1), petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuainya, baik atara satu dengan yang lain, maupun denga tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.
- e. Keterangan Terdakwa

Menurut pasal 189 ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.¹⁸

1. Unsur Subjektif

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan tindak pidana.

2. Unsur Objektif

Yang dimaksud menyediakan jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perscorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi, radio telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

- a. Barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun, bentuk penyimpanan data lainnya; dan
- b. Data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

1. Pengertian Pembuktian dalam Hukum Islam

²⁰ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

[illegible]

pembuktian yaitu segala sesuatu yang dapat menampakkan kebenaran, baik ia merupakan saksi atau sesuatu yang lain. Lebih lanjut ia memberikan penjelesan yang dimaksud dengan membuktikan sesuatu ialah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan, dan yang dimaksud dengan yakin adalah sesuatu yang diakui adanya, berdasarkan kepada penyelidikan atau dalil. Dan sesuatu yang sudah diyakinkan adanya, tidak bisa hilang terkecuali dengan datangnya keyakinan yang lain²².

Dalam hukum acara peradilan Islam untuk membuktikan suatu kebenaran gugatan adalah tugas dari penggugat, maka wajib seorang penggugat mengajukan gugatannya. Bahwa untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan *petitum* gugatannya, seseorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya²³.

Sebagaimana kaidah kulliyah yang menyatakan sebagai berikut:

“Bukti adalah untuk menetapkan yang berbeda dengan keadaan *dzohir* dan sumpah untuk menetapkan keadaan asalnya”.²⁴

Kaidah ini didasarkan kepada hadits Nabi Muhammad saw yang, berbunyi:

²² Teungku M.hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan hukum acara islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 129.

²³ Ibnu qoyyim Al-jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005), 15.

²⁴ Ibid., 42.

642/Pid.B/2015/PN.Dps

Dalam hal ini saksi Edi Sutrisno, saksi Made wivaksana, SH, dan saksi I Nyoman Suryawan yang merupakan anggota Kepolisian dari Kesatuan

Polresta Denpasar melakukan penyelidikan, kemudian mendapati terjadi perbuatan praktek prostitusi di dalam kamar 104 Hotel Tari, yang dilakukan oleh saksi I Nyoman Suardana alias Aplon dan perempuan yang telah melayani saksi Aplon yaitu saksi Yuni Latifah alias Vita, dalam penyelidikan tersebut saksi Vita telah menerima pembayaran sebesar Rp. 600.000,- yang diberikan oleh saksi Aplon dengan rincian Rp. 500.000,- sebagai uang jasa dan Rp. 100.000,- merupakan uang tips yang diberikan saksi Aplon kepada saksi Vita. Dari uang Rp. 600.000,- tersebut sebesar Rp. 200.000,- akan diberikan saksi Vita kepada terdakwa Ita Leli Novida alias Memey karena dalam kasus ini Memey bertindak sebagai geromo.

Kasus ini berawal dari Saksi I Nyoman Suardana alias Aplon dan Yuni Latifah alias Vita melakukan praktek prostitusi yang difasilitasi oleh terdakwa melalui layanan BBM (*Blackberry Masenger*), dengan layanan media sosial ini saksi I Nyoman Suardana alias Aplon biasa menyewa jasa dari saksi Yuni Latifah alias Vita, dimana saksi I Nyoman Suardan alias Aplon mendapatkan kontak BBM dan nomor Hp 082211881968 milik terdakwa berawal dari sebuah iklan di salah satu koran pada pojok rupa – rupa yang menawarkan jasa pijat.

Setelah itu saksi I Nyoman Suardana dan terdakwa Ita Leli Novida melakukan komunikasi, terdakwa menyuruh saksi I Nyoman Suardana untuk segera datang Hotel Tari Kamar No.104 karena saksi Yuni Latifah akan

meluncur ke Hotel Tari Kamar No.104 yang telah ditentukan. Atas pesanan saksi I Nyoman Suardana.

Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa menghubungi dan mengabarkan saksi Yuni Latifah melalui pesan layanan media sosial BBM (*Blackberry Masenger*) bahwa saksi I Nyoman Suardana sedang dalam perjalanan menuju hotel yang telah disepakati. Kemudian saksi Yuni Latifah membalas pesan dari terdakwa Ita Leli Novida dengan mengatakan dia telah siap.

Terdakwa mengirim pesan kembali kepada saksi Yuni Latifah bahwa kamar yang digunakan untuk tempat melakukan hubungan badan berada di kamar 104 dengan mengatakan kamar yang membayar adalah saksi I Nyoman Suardana.

Kemudian saksi Yuni Latifah menuju Hotel Tari dan kamar 104 yang akan digunakan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi I Nyoman Suardana, setelah itu kamar yang digunakan mereka untuk melakukan hubungan badan digrebeg oleh petugas kepolisian dari Polresta Denpasar, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Ita Leli Novida pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 04.00 pagi di Jalan Teuku Umar Gang Pulau Indah I Nomor 3 Denpasar.

Barat Kota Denpasar ada PSK (*Pekerja Seks Komersial*) yang sedang melayani tamu laki-laki yang bukan suaminya untuk melakukan hubungan badan selayaknya suami istri. Berbekal informasi tersebut, para saksi melakukan penyelidikan kemudian didapati seorang perempuan yang bernama Yuni Latifah sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan seorang laki-laki.

Saat penggerebekan saksi I dan II membenarkan bahwa saksi Yuni Latifah telah selesai melakukan hubungan badan dengan saksi I Nyoman Suardana dan telah menerima pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tips sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Saksi I dan II membenarkan bahwa saksi Yuni Latifah mendapatkan tamu laki-laki dari terdakwa dan sudah 2 (dua) kali menerima tamu dari terdakwa yaitu pada tanggal 14 Mei 2015 dan tanggal 15 Mei 2015, dimana setiap tamu yang diberikannya tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi I melakukan penangkapan.

Membenarkan bahwa terdakwa memberikan tamu kepada saksi Yuni Latifah dengan cara menghubungi melalui media sosial BBM dimana

Dalam keterangannya saksi I dan II membenarkan bahwa terdakwa bertindak sebagai mucikari karena setiap mendapatkan tamu laki-laki yang akan diberikan kepada anak buahnya, maka terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

2. Saksi Yuni Latifah dalam keterangannya membenarkan bahwa hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekitar pukul 19.20 Wita saksi telah digerebeg oleh petugas kepolisian dari Polresta Denpasar di Hotel Tari Kamar No. 104 Jalon Cargo Indah No. 8 Kkecamatan Denasar Bbarat Kota Denpasar karena telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan seorang laki-laki yaitu saksi I Nyoman Suardana.

Dalam penjelasannya yang bersangkutan membenarkan bahwa dia mengenal saksi I Nyoman Suardana dari terdakwa Ita Leli Novida yang dikenalkan sejak 1 (satu) bulan yang lalu saat sama-sama bekerja di Spa Bulgari, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Yuni Latifah apakah

jika ada tamu laki-laki mau melayaninya dan yang bersangkutan dalam hal ini saksi Yuni Latifah menjawab iya, sehingga baik saksi maupun terdakwa bertukar kontak media sosial BBM.

Saksi membenarkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2015 terdakwa mengirim pesan kepada saksi dengan mengatakan dalam pesannya jika dia harus segera ke kamar nomor 105 kemudian yang bersangkutan dalam hal ini saksi Yuni Latifah membalas pesan tersebut dengan mengatakan dia akan segera otw dan menanyakan apakah tamu berada di dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa membenarkannya. Saksi menanyakan soal tarif kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) belum termasuk harga kamar.

Setelah melayani tamunya saksi meminta komisi kepada terdakwa untuk segera menstransfer ke rekening BCA atas nama Rizky Bogie tetapi karena saksi mempunyai hutang sandal kepada Koko sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) maka saksi hanya mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Di hari yang sama saksi Yuni Latifah meminta kepada terdakwa tamu lagi, namun terdakwa mengatakan belum ada tamu dan sepi.

Kemudian tanggal 15 Mei 2015 sekitar pukul 17.00 WITA saksi membenarkan bahwa terdakwa menghubunginya kembali dengan

3. Saksi Risky Pogie Wahana membenarkan bahwa saksi mengetahui terdakwa memang bekerja di Bulgari Spa, dan mengetahui juga bahwa terdakwa bekerja sebagai geromo/mucikari yang menawarkan anak buahnya untuk diajak berhubungan badan layaknya suami istri dan atas setiap jasanya tersebut, terdakwa mendapatkan uang komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

[illegible]

mengetahui bahwa ATM tersebut digunakan terdakwa untuk menerima uang transferan atas komisi dari jasa pelacuran yang diberikan laki-laki pemakai jasa anak buahnya karena ATM dipegang oleh terdakwa.

4. Saksi I Nyoman Suardana yang dalam kasus ini sebagai laki-laki yang meminta jasa layanan prostitusi *online* kepada terdakwa membenarkan bahwa dalam hari dimana dia ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polresta Denpasar Barat Kota Denpasar di Hotel Tari Kamar No.104, saksi sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Yuni Latifah.

Saksi mengatakan mendapatkan jasa layanan prostitusi *online* ini berawal dari salah satu koran pada pojok rupa-rupa yang menawarkan jasa pijat yang dalam iklan tersebut sudah tercantum nomor Hp dan Pin BB terdakwa dengan nama kontak Miss Medhok KyuKyu. Saksi juga membenarkan atas pelayanan yang diberikan saksi Yuni Latifah, saksi memberikan pembayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang dalam pengakuan saksi Yuni Latifah uang tersebut dibagi dengan pembagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk maminya yang dalam kasus ini adalah terdakwa dan sisanya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk saksi Yuni Latifah.

5. Terdakwa Ita Leli Novida dalam kasus ini membenarkan bahwa dia mengenal saksi I Nyoman Suardana dan saksi Yuni Latifah yang ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Denpasar Barat Kota Denpasar di Hotel Tari Kamar No. 104 Jalan Cargo Indah No. 8 Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar pada hari jumat, tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 19.20 Wita, terdakwa melakukan pekerjaan ini karena mendapatkan warisan pekerjaan yang diberikan kakak iparnya yang ditangkap karena kasus narkoba yang sebelumnya telah memasang iklan yang menawarkan jasa pijat di Hp nomor 082211081968 dan PIN BB 3151B857 dengan nama kontak Miss Medhok Kyukyu

Terdakwa membenarkan jika mengenal saksi Yuni Latifah karena pernah sama-sama bekerja di Bulgari Spa, terdakwa mengatakan memberikan 2 tamu pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2015 dan hari Jumat, tanggal 15 Mei 2015 karena atas permintaan saksi Yuni Latifah yang semua tamunya diarahkan ke Hotel Tari di Jalan Cargo Indah No.8 Kecamatan Denpasar Kota Denpasar, ini dilakukan terdakwa karena manajemen antara Hotel Tari dan Bulgari Spa tempat dia bekerja sama.

Terdakwa juga memberikan 1 tamu selain saksi Yuni Latifah yaitu kepada Putri, dalam setiap kesepakatan atas jasa yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Yuni Latifah dan Putri, terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana untuk Putri

Terdakwa membenarkan bahwa tujuannya dia memfasilitasi perbuatan cabul ini melalui layanan BBM baik kepada saksi Yuni Latifah maupun putri karena alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan terdakwa juga mngaui bahwa telah menawarkan jasa pijat pada iklan surat kabar tersebut yang dimana hal itu memudahkan saksi Yuni Latifah dan Putri sebagai pekerja seks komersial mendapatkan pekerjaannya untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan tamu-tamu yang telah memesan mereka melalui nomor Hp dan kontak BBM terdakwa.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan barang bukti di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka

sampailah Majelis Hakim melakukan pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Peuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim hanya mempertimbangkan salah satunya yang dapat dipandang telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 296 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang dalam hal ini orang sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dan orang tersebut harus sehat jasmani dan rohaninya, serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Dan yang telah memenuhi unsur barang siapa dalam persidangan ini adalah terdakwa atas nama Ita Leli Novida alias Memey, yang identitasnya telah dicantumkan dalam surat dakwan oleh Penuntut Umum yang menerangkan dengan jelas perbuatan terdakwa, serta menilai isi keterangan saksi maka Majelis Hakim menganggap terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya.

2. Unsur Dengan Sengaja Menyebabkan atau Memudahkan Perbuatan Cabul Oleh Orang Lain Dengan Sengaja.

Sengaja dalam unsur ini ada 3 bentuk yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai kemungkinan, inti dari ketiga bentuk kesengajaan ini adalah bahwa pelaku menghendaki melakukan tindakan pidana yang dilakukannya, namun berbeda dengan akibat yang akan ditimbulkannya.

Fakta-fakta yang memenuhi unsur ini adalah didasarkan pada keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan yang dibenarkan pula dengan keteranga terdakwa Ita Leli Novida alias Memey. Ini berawal dari terdakwa yang memasang iklan di salah satu Koran pada pojok rupa-rupa yang menawarkan massage yang disertai dengan Nomor Hp terdakwa dan juga Pin BB dengan nama kontak MISS MEDHOK KYUKYU agar jika pelanggan yang menyewa jasa anak buah terdakwa bias melalui kontak yang ada dalam iklan tersebut.

Dalam hal ini saksi I Nyoman Suardana alias Aplon kemudian menghubungi terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 untuk menyewa salah satu anak buah terdakwa, setelah ditelpon Memey yang selaku terdakwa menyuruh saksi Aplon untuk segera meluncur ke Hotel Tari Kamar Nomor 104 di Jalan Cargo Indah No.8 Kota Denpasar karena saksi Yuni Latifah alias Vita yang merupakan anak buah terdakwa segera

Dikatakan sebagai *pencabarian*, jika pada dasarnya terdakwa menggantungkan penghidupannya pada pekerjaan sebagai penghubung-pencabulan, sedangkan yang dimaksud dengan *kebiasaan* jika untuk melakukan penghubungan-pencabulan tersebut sudah tidak asing lagi bagi terdakwa.

[illegible]

Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pada diri terdakwa, antara lain sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kegiatan pelacuan/prostitusi.
- b. Hal-hal yang meringankan: terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan, terdakwa menyesali semua perbuatannya dan mengaku bersalah, terdakwa belum pernah dihukum.

[illegible]

- [illegible]

**ANALISIS HUKUM ACARA PIDANA DAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM
TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* (Studi
Putusan Nomor : 642/Pid.B/2015/PN.Dps)**

Berdasarkan kronologi kasus yang ada pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 642/Pid.B/2015/PN.Dps, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yakni Memey, berawal dari terdakwa Memey yang membuat iklan pojok rupa-rupa di salah satu media cetak (koran) yang dimana dalam iklan tersebut Memey mencantumkan nomor handphone serta pin BBM (*Blackberry Massanger*) dengan menggunakan nama kontak MISS MEDHOK KYUKYU. Dan layanan BBM (*Blackbarry Massanger*) ini digunakan terdakwa memey untuk menawarkan bisnis prostitusinya kepada para pelanggan yang akan menyewa anak buaahnya. Dalam hal ini hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama (lima) bulan dengan dakwaan melanggar pasal 296 KUHP. Hal ini berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu pasal 296 KUHP atau Pasal 506 KUHP.

[illegible]

Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana
Putusan Nomor : 642/Pid.B/2015/PN.Dps)
Berdasarkan analisis penulis dalam putusan
Putusan Nomor 642/PN.Dps ini juga melanggar Undang-Undang
merupakan tindak pidana *lex specialis* ini berdasar
dalam persidangan yaitu berdasarkan ketidakhadiran
terdakwa maupun barang bukti, berikut penjelasan
dengan saksi
dalam persidangan keterangan saksi yakni yang

Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana
Putusan Nomor : 642/Pid.B/2015/PN.Dps)
Berdasarkan analisis penulis dalam putusan
Putusan Nomor 642/PN.Dps ini juga melanggar Undang-Undang
merupakan tindak pidana *lex specialis* ini berdasar
dalam persidangan yaitu berdasarkan ketidakhadiran
terdakwa maupun barang bukti, berikut penjelasan
dengan saksi
dalam persidangan keterangan saksi yakni yang

Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana
Putusan Nomor : 642/Pid.B/2015/PN.Dps)
Berdasarkan analisis penulis dalam putusan
Putusan Nomor 642/PN.Dps ini juga melanggar Undang-Undang
merupakan tindak pidana *lex specialis* ini berdasar
dalam persidangan yaitu berdasarkan ketidakhadiran
terdakwa maupun barang bukti, berikut penjelasan
keterangan saksi
dalam persidangan keterangan saksi yakni yang

Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana
Putusan Nomor : 642/Pid.B/2015/PN.Dps)
urut analisis penulis dalam putusan
2015/PN.Dps ini juga melanggar Undang-Unda
merupakan tindak pidana *lex specialis* ini berda
dalam persidangan yaitu berdasarkan ket
n terdakwa maupun barang bukti, berikut penjel
ngan saksi
dalam persidangan keterangan saksi yakni yang

Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana
Putusan Nomor : 642/Pid.B/2015/PN.Dps)
Berdasarkan analisis penulis dalam putusan
Putusan Nomor 642/PN.Dps ini juga melanggar Undang-Undang
merupakan tindak pidana *lex specialis* ini berdasar
dalam persidangan yaitu berdasarkan ketidakhadiran
terdakwa maupun barang bukti, berikut penjelasan
dengan saksi
dalam persidangan keterangan saksi yakni yang

Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana
Putusan Nomor : 642/Pid.B/2015/PN.Dps)
urut analisis penulis dalam putusan
2015/PN.Dps ini juga melanggar Undang-Unda
merupakan tindak pidana *lex specialis* ini berda
dalam persidangan yaitu berdasarkan ket
n terdakwa maupun barang bukti, berikut penjel
ngan saksi
dalam persidangan keterangan saksi yakni yang

berdasarkan perintah dari terdakwa melalui pesan layanan BBM yang dalam pesan tersebut mengatakan “servis terus ML”.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa dalam persidangan membenarkan bahwa telah memfasilitasi dan menawarkan layanan seksual melalui layanan media komunikasi BBM (*Blackbery Massanger*) yang diiklankan pada salah satu pojok koran rupa-rupa, kemudian juga terdapat barang bukti 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih dan 1 (satu) buah Hp Blackberry warna hitam yang digunakan untuk menawarkan layanan seksual.

c. Petunjuk

Tulisan atau pesan terdakwa kepada saksi Yuni Latifah atau Vita melalui layanan komunikasi BBM (*Blackberry Massanger*) yakni pesan dalam bentuk perintah “servis terus ML”. Kata ML adalah singkatan dari *Making Love* yang artinya adalah kegiatan berhubungan badan antara layaknya suami istri, yang jika dianalisis kata tersebut telah memuat unsur kesusilaan. Istilah ini digunakan bukan hanya kegiatan berhubungan badan antara suami dan istri tapi melainkan juga kegiatan berhubungan badan orang yang belum menikah. Petunjuk ini yang dapat dimasukkan majelis hakim di dalam pertimbangan hukumnya.

Dalam Pasal 24 UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 tulisan atau pesan tersebut bisa dijadikan alat bukti yang sah karena dalam isi pasal

- a. Barang yang memuat pada tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun, bentuk penyimpanan data lainnya; dan
- b. Data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Menyediakan jasa pronografi, yang dimaksud menyediakan jasa pornografi adalah menawarkan, menyajikan, mengeksploitasi segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi, radio telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

[illegible]

dikategorikan menyediakan jasa pornografi seperti yang telah dijelaskan dalam pasal tersebut.

Ancaman pidana terhadap terdakwa ini telah tercantum sebagaimana diatur dalam pasal 30 UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 yang berbunyi “ setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Bahwa berdasarkan hal ini seharusnya hakim harus lebih ermat dalam memutus perkara putusan tersebut karna di dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa yang melanggar *Lex Specialis* yakni Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, maka majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya harus mencantumkan dan menjelaskan dengan lengkap dan matang UU yang berkaitan, meskipun di dalam dakwaan tidak ada UU yang terkait yang diajukan jaksa penuntut umum.

Pertama, yaitu adalah pengakuan (*ikrar*), Pengakuan adalah bentuk keterangan terdakwa di dalam persidangan dalam upaya untuk membuktikan keterangan terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Menurut hukum asal , apabila terdakwa telah mengakui perbuatan yang telah dilakukannya maka hakim dapat memutus perkara dengan melihat dari pengakuan terdakwa tersebut. Dalam putusan ini terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan.

Kedua, yaitu kesaksian (*syahadah*) Islam memandang saksi merupakan hal yang penting dalam penegakan kebenaran dan keadilan. Dalam putusan ini jaksa telah mengajukan 5 orang saksi yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang telah diperiksa oleh majelis hakim di antaranya mereka adalah saksi Made Wicaksana, saksi I Nyoman Suryawan yang keduanya merupakan anggota kepolisian yang keduanya melakukan penangkapan terhadap saksi Yuni Latifah alias Vita dan saksi I Nyoman Suardana alias Aplon, kemudian juga saksi Risky Pogic Wahana. Berdasarkan pengajuan saksi dalam hukum pidana Islam, maka saksi yang diajukan jaksa penuntut umum dalam putusan ini sda memenuhi kriteria saksi dalam hukum pidana Islam, yakni dalam QS. Al-Baqarah (2): 282 “Dan

Untuk membuktikan pelaku zina dalam prostitusi ini perlu kehati-hatian, karena hukuman bagi pelaku zina sangat berat. Dalam kasus ini untuk membuktikannya perlu dasar, antara lain:

- Dalam al-Qur'an dan hadist zina dibagi menjadi 2 yaitu:

- [illegible]

Dengan demikian pembuktian menurut hukum acara pidana Islam dalam putusan-putusan nomo 642/Pid.B/2015/PN.Dps telah sesuai dengan syarat pembuktian dalam hukum acara pidana Islam.



PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 72

Pornografi tetapi seharusnya dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya hakim membuktikan dengan Undang-Undang yang berkaitan, dan lebih cermat dalam melihat fakta-fakta yang ada di persidangan dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan secara lengkap, dan matang.

3. Sistem pembuktian di dalam hukum acara pidana Islam, alat bukti terdiri dari pengakuan (*ikrar*), kesaksian (*syahadah*), petunjuk (*qorinah*), sumpah (*yamin*), dan penolakan sumpah (*nukuh*). Di dalam Putusan pengadilan Negeri Kota sampan dalam perkara nomor 136/Pid.B/2015/PN.Spg ini dalam pembuktian telah mengajukan alat bukti berupa pengakuan, kesaksian, petunjuk, dan sumpah. Dalam hal ini pembuktian yang ada di dalam persidangan sudah sesuai dengan pembuktian yang ada di dalam hukum acara pidana Islam.

B. Saran

1. Diharapkan dalam pembaharuan hukum pidana mengenai pemasalahan prostitusi, agar diatur secara lengkap dan jelas yang mengatur keseluruhan terhadap pelaku-pelaku dalam tindak pidana prostitusi sehingga tidak terdapat kesenjangan hkum yang ada dalam masyarakat.
2. Diharapkan demi penegakan hukum sebagai posisi tertinggi dalam Negara yang untuk melindungi semua lapisan masyarakat, para penegak hukum agar dapat lebih komprehensif mengoptimalkan Peraturan Perundang-

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. 2011.
- Karyadi M dan Soesilo R. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan dan Komentar*. Bogor: Pholitea. 1997.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Bandung. 1981.
- Mahmasani, Sobhi. *Falsafatu at-Tasyri' fi al-islam, terjemah Ahmad Sudjono, Filsafat Hukum Dalam Islam*. Bandung: PT. Salma Arif. 1976.
- Madkur, M Salam. *Al Qodlo' Fil Islam, Terjemah, Imron AM, Peradilan dalam Islam*. Surabaya: Bima Ilmu, t.t.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontoporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Citra Bakti. 1984.
- Purnomo, Bambang. *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: Liberti. 2004.
- Prints, Darwin. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan. 1998.
- Sasangka Hari dan Rosita Lily. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Maju. 2003.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Utami, Diah. Pencegahan Praktik Prostitusi *Online* Melalui Lembaga Sekolah Dan Keluarga. *The Journal Of Society & Media*. 2017.
- Widodo. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2011.
- Yudowidakdo, Hendrastanto, dkk. *Kapita Selektta Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.